


Lokakarya Nasional Peran LSM dalam Meningkatkan Layanan Publik: Belajar dari Gerakan Sosial lain untuk Meningkatkan Respon terhadap HIV dan AIDS

Rekaman Proses dan Rekomendasi

Hari Pertama

Dimulai dengan perkenalan seluruh peserta, fasilitator, dan nara sumber sebelum masuk pada sesi pertama tentang aktivisme dalam pengurangan dampak buruk napza (HR) oleh James Blogg. Nara sumber berbicara tentang tujuan pengurangan dampak terhadap masalah sosial dan ekonomi dari pemakaian napza suntik yang realistis. Menurutnya 80% dari sesuatu lebih baik daripada 100% dari tidak ada sama sekali. Selanjutnya nara sumber bercerita tentang penerimaan dan penolakan HR di berbagai penjuru dunia, dimana berdasarkan data, negara-negara yang telah menerapkan HR tidak pernah menyesali keputusannya dan kemudian tidak lagi melaksanakan. Nara sumber memaparkan sebuah studi tentang kesenjangan antara jumlah populasi penasun dan prevalensi HIV dengan tiga produk hukum napza di 89 kota besar AS.

1. Pemenjaraan atas kepemilikan napza	Estimasi populasi penasun per kapita TIDAK BERHUBUNGAN
2. Penangkapan oleh polisi per kapita	HIV seroprevalensi pada penasun SEMAKIN REPRESIF, SEMAKIN TINGGI
3. Pencegahan pembelian per kapita	



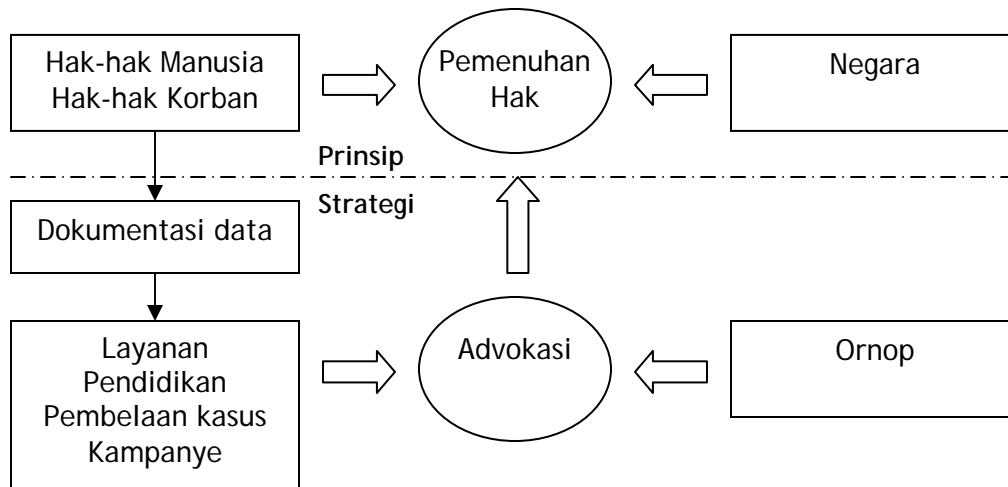
The diagram consists of a large arrow pointing from the right side of the table to a circle. Inside the circle, the text reads 'Metode alternatif untuk masalah sosial'.

Selanjutnya pemaparan tentang prinsip-prinsip aktivisme beserta keberhasilan advokasi di sejumlah negara di dunia, termasuk Australia, dalam menyelenggarakan HR. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas, menjalin hubungan dengan aliansi strategis dan taktis, memperhitungkan budaya dan nilai-nilai setempat, serta mempersiapkan untuk ketidakberterimaan.

Sesi kedua tentang aktivisme yang efektif melalui pemilihan kata oleh Abby Ruddick. Nara sumber mengutarakan bahwa dalam “menjual” konsep, paradigma, dan gagasan dibutuhkan tujuan yang jelas dan layak untuk dicapai; aliansi (sekongkol) yang tepat dan jelas; kemasan yang inovatif, sesuai, dan mengena; serta pembagian peran dan tugas yang jelas sesuai dengan kemampuan dan mandat masing-masing.

Nara sumber mendiskusikan sejumlah contoh kata yang sering digunakan untuk advokasi program-program HIV dan AIDS dimana kata-kata tersebut akan dimaknai tergantung pada latar belakang budaya, instansi, agenda politik, dll. Selain itu pemaknaan kata, khususnya hak, perlu juga diimbangi dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagai sesama warga negara sehingga korban tidak menjadi eksklusif di antara warga negara lainnya. Jadi ketika berbicara mengenai hak-hak individu, hak-hak individu lain juga perlu diperhitungkan. Artinya, jangan sampai pemenuhan hak-hak seseorang melanggar hak-hak individu lain. Namun ketika berbicara tentang hak manusia yang dilindungi oleh negara, masyarakat tidak memiliki kewajiban karena yang memiliki kewajiban adalah negara.

Dalam diskusi kemudian juga disinggung mengenai pelaku advokasi dimana perlu memisahkan antara prinsip dan strategi, karena di banyak tempat, strategi pengurangan dampak buruk - penyediaan suntikan steril dan layanan lain, dijadikan prinsip oleh organisasi non pemerintah (ornop) sehingga yang terjadi adalah ornop mengambil peran pemerintah sebagai pemberi layanan. Bila demikian kasusnya, maka ornop membutuhkan sumber daya yang mencukupi untuk dapat mencakup paling tidak 70% populasi sasaran, sementara sumber daya tersebut sangat terbatas - paling tidak saat ini hanya didapat dari donor-donor internasional.



Di penghujung sesi, nara sumber mengajak para peserta untuk memilih kata-kata yang tepat yang dimulai dari permasalahannya, bukan istilahnya. Banyak program yang dilaksanakan saat ini adalah bawaan dari luar negeri sebagaimana dengan istilahnya, yang kemudian beberapa istilah tidak memiliki padanan dalam Bahasa Indonesia. Nara sumber mengangkat satu istilah *confidentiality* yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai *kerahasiaan*, dalam Bahasa Inggris *secrecy*. Dalam kerahasiaan terdapat aib yang tidak boleh diketahui orang lain, sehingga ketika kerahasiaan dijadikan prinsip dalam tes HIV, maka orang-orang yang akan dites menganggap tes tersebut mengandung aib. Tak heran jika kemudian hingga saat ini masih sangat minim cakupan program konseling dan tes HIV sukarela.

Nara sumber ketiga, Arry Lesmana, mengangkat tema indikator kualitatif program pemberdayaan masyarakat. Dijelaskan bahwa terdapat ketegangan struktural dalam program penanggulangan HIV: layanan kesehatan vs. legalisasi maksiat. Oleh karena itu dibutuhkan pemberdayaan-pemberdayaan melalui pembentukan kelompok terkecil dari mulai korban, keluarga, sistem pelayanan, hingga masyarakat. Namun demikian cara melakukan pemberdayaan untuk mengatasi persoalan menjadi penting ketika dihadapkan dengan sumber daya sebuah institusi. Nara sumber menjelaskan adanya dua proses pembentukan kelompok: struktural dan partisipatoris. Proses pembentukan secara struktural adalah dengan penunjukkan oleh otoritas di suatu daerah untuk terbentuknya sebuah kelompok, biasanya ditandai dengan adanya surat keputusan penguasa.

Indikator untuk pemecahan-pemecahan masalah tersebut perlu mencakup tiga hal: deskripsi kegiatan; metode operasional, dan indikator hasil. Dan dalam pengembangan masyarakat terdapat dua pendekatan: profesional dan radikal. Pendekatan pemberdayaan profesional adalah upaya untuk meningkatkan kemandirian dan

memperbaiki sistem pemberian layanan, sementara yang radikal adalah upaya mengubah ketidakseimbangan yang ada melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan mereka, serta menganalisa sumber-sumber ketertindasannya.

Pendekatan	Perspektif	Tujuan/Asumsi
Profesional (netral/teknikal)	<ul style="list-style-type: none"> - perawatan - pengorganisasian - pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan inisiatif dan kemandirian masyarakat - memperbaiki pemberian pelayanan sosial
Radikal (transformasional)	<ul style="list-style-type: none"> - aksi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kesadaran dan inisiatif masyarakat - memberdayakan masyarakat guna mencari akar penyebab ketertindasan dan diskriminasi - mengembangkan strategi dan membangun kerja sama dalam melakukan perubahan sosial

Sementara itu dalam penutupnya nara sumber kembali menanyakan kepada peserta apakah pemberdayaan yang telah dilakukan selama ini *to give a power or authority* atau *to give ability or to enable?*

Selanjutnya fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya kepada nara sumber. Kebanyakan pertanyaan mengarah pada teknis kegiatan dan cara mengaplikasikan indikator, dimana nara sumber sendiri sebenarnya ingin mengajak para peserta untuk merumuskan indikator kegiatan pemberdayaan ini. Dan di titik ini fasilitator mengajak para peserta untuk membongkar paradigma yang selama ini digunakan dalam memandang masalah. Sebab menurutnya, tidak akan berguna jika cara yang digunakan berubah sementara paradigmanya masih sama. Hal tersebut pastinya akan mempengaruhi indikator yang akan digunakan.

Dari cara pandang kemudian dapat menentukan metode, teknik, dan prosesnya hingga ditentukan alat, piranti, dan media dalam melakukan kerja-kerja advokasi. Karenanya, alur ini memerlukan prasyarat yang harus dipenuhi oleh sebuah organisasi. Dan untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai cara pandang tersebut, fasilitator memberikan kesempatan kepada tiga organisasi non pemerintah (ornop) peserta lokakarya ini untuk mempresentasikan kegiatannya selama ini beserta rencana ke depannya.

Presentasi-presentasi tersebut menunjukkan hambatan yang berarti ketika HR dihadapkan pada: sosial budaya; aksi-aksi represif; serta kriminalisasi pengguna napza. Dan pada akhirnya hambatan-hambatan tersebut mempengaruhi angka, atau bahkan menurunnya, pencapaian yang telah ditetapkan untuk layanan HR yang dilakukan ornop. Namun demikian, ornop pelaksana layanan HR memiliki peluang yaitu teman-teman dan data lapangan yang telah didapat selama ini.

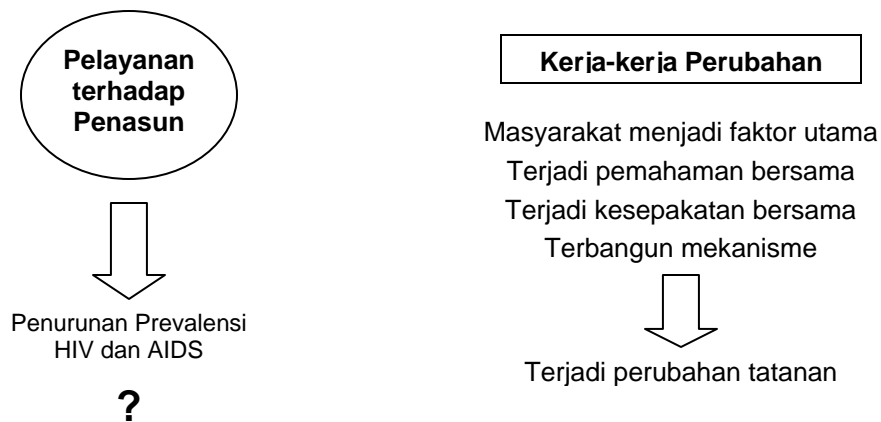
Disadari juga oleh para peserta bahwa pemberian layanan selama ini telah menimbulkan ketergantungan pada para penasun, sehingga menjadi pertanyaan besar ketika sudah tidak ada lagi yang mendanai kegiatan layanan HR ornop-ornop tersebut. Oleh karenanya dibutuhkan suatu pembentukan pola penasun yang aktif mengambil layanan (jarum terutama) di outlet-outlet yang perlu disediakan.



Di sesi ini juga ditegaskan bahwa sumber daya yang terbatas dari ornop untuk memberikan layanan tidak cukup untuk mengimbangi populasi penasun di tiap daerahnya. Untuk itu diperlukan suatu perubahan cara dalam merespon masalah, dan dengan demikian pemerintahlah yang mengambil peran pelayanan karena merupakan kewajiban negara untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Ditegaskan bahwa terdapat dua macam cara dalam menyelesaikan persoalan, yang pertama adalah penyelesaian kasus. Cara ini yang banyak dilakukan oleh ornop peserta lokakarya. Cara-cara ini termasuk di dalamnya penyelesaian kasus kesehatan, psikologi, peradilan, dan ekonomi. Cara ini tidak akan menjawab persoalan kecuali ornop memiliki sumber daya yang besar hingga tak terbatas karena, dalam hal kesehatan, dibutuhkan banyak dokter, perawat, obat-obatan, sarana pencegahan penyakit bagi seluruh sasaran program. Dan sebenarnya ini merupakan tanggung jawab negara untuk menyediakannya.

Cara yang kedua adalah proses pendidikan, dimana melalui proses ini akan timbul kesadaran baru di masyarakat yang kemudian melahirkan kesepakatan-kesepakatan, tindakan-tindakan menuju perubahan, hingga terbangunnya mekanisme dan sistem. Proses ini membutuhkan sumber daya yang jauh lebih sedikit daripada cara sebelumnya. Ini merupakan kerja-kerja perubahan dimana masyarakat menjadi faktor utama untuk terjadinya pemahaman, kesepakatan, dan membangun mekanisme bersama. Dan dengan demikian guliran proses tersebut pada akhirnya mendorong terjadinya suatu perubahan tatanan di masyarakat itu sendiri. Hal ini merupakan refleksi ketika kerja-kerja pelayanan terhadap penasun yang dilakukan ornop selama ini tak mampu menjawab tantangan penurunan prevalensi HIV.



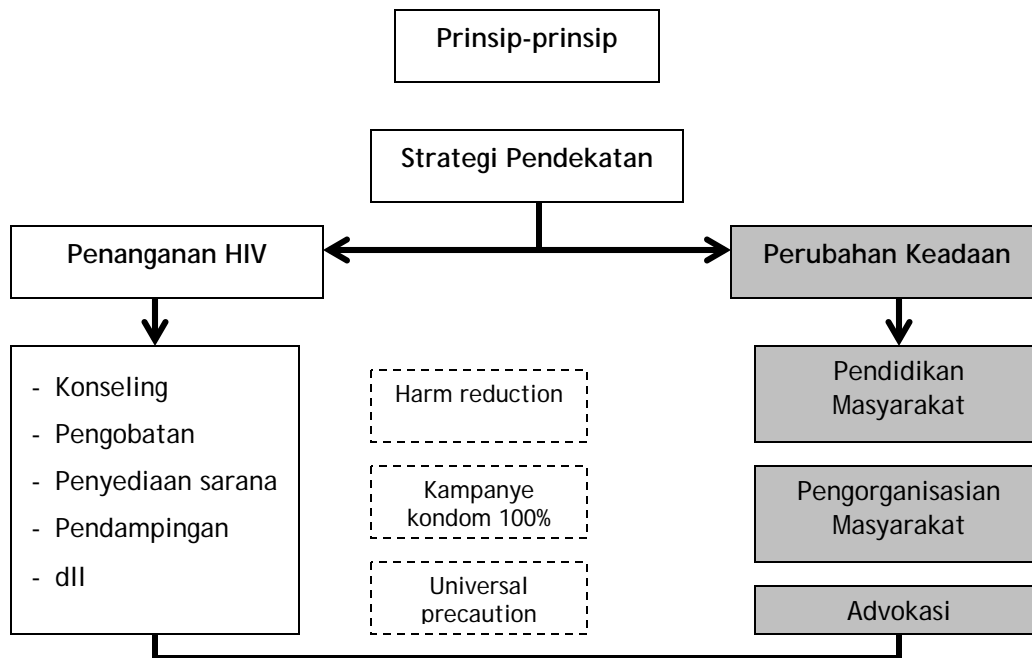
Justifikasi dari kerja-kerja perubahan adalah dengan mengupayakan terjadinya perubahan tatanan, dalam prosesnya akan tercipta suatu produk kesadaran, kesepakatan, serta kebijakan dan sistem. Sehingga dengan ketiga produk tersebut upaya-upaya untuk mencegah, mengobati, dan melindungi masyarakat dari HIV mendapat legitimasi seiring dengan disediakannya secara luas layanan melalui sistem negara. Dengan demikian prevalensi dapat diturunkan melalui perubahan tatanan dalam masyarakat yang mendukung kerja-kerja penanganan HIV.

Fasilitator juga menerangkan tiga metode yang bersifat sentralistik, partisipatoris, dan dialogis yang ketika menggunakan cara pandang konservatif (masalah pada alam) akan berimplikasi pada kesadaran magis. Sementara ketika menggunakan cara pandang liberal (masalah pada manusia) akan berimplikasi pada kesadaran naif, dan ketika

metode dialogis menggunakan cara pandang radikal (masalah pada sistem) akan berimplikasi pada kesadaran kritis.

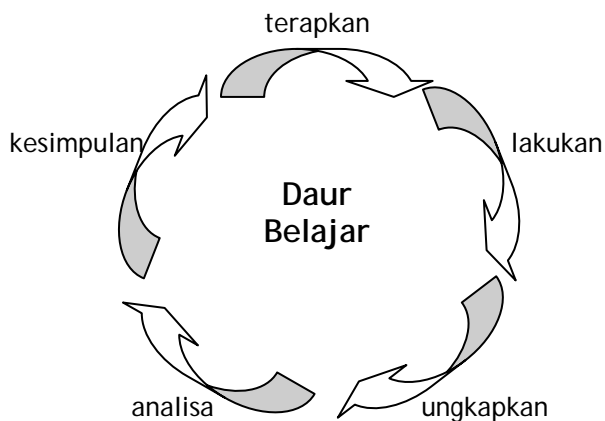
Di penghujung hari pertama ini fasilitator menayangkan sebuah dokumentasi tentang kerja pendidikan yang berhasil menciptakan kemandirian pada sebuah komunitas pedesaan di provinsi NTT. Tayangan ini mencoba memberikan gambaran kepada peserta lokakarya bahwa pendidikan formal yang ada saat ini justru membelenggu manusia, dan bahwa kecerdasan itu tidak hanya didapat oleh orang-orang yang bersekolah.

Dalam merangkum lokakarya hari pertama ini, menggambarkan strategi pendekatan yang berbeda untuk prinsip penurunan prevalensi HIV, fasilitator menjelaskan keterkaitannya melalui bagan di bawah ini:



Hari Kedua

Setelah mengkaji ulang pembelajaran di hari sebelumnya, fasilitator mengajak seluruh peserta untuk bermain "menangkan sebanyak-banyaknya". Pelajaran moral dari permainan ini adalah bahwa bumi ini cukup bagi semua orang kecuali jika ada satu orang yang serakah. Di samping itu melalui permainan ini didapat contoh bagaimana menganalisa data-data yang telah terkumpul sepanjang permainan. Analisa merupakan satu dari daur belajar yang coba diterangkan melalui permainan ini. Daur belajar adalah proses-proses yang perlu dilewati ketika melakukan pendidikan bersama masyarakat, proses-proses tersebut dilakukan bersama-sama, bukan oleh fasilitator maupun peserta didiknya saja. Di dalam daur tersebut, analisa merupakan hal yang membedakan karena tergantung cara pandang yang digunakan dalam menganalisa data-data yang terkumpul sepanjang daur belajar sebelumnya. Di titik ini, daur selanjutnya akan ditentukan hingga berputar kembali ke analisa.



LAKUKAN (mengalami)
 Proses selalu dimulai dari pengalaman dengan cara melakukan langsung kegiatan. Masyarakat terlibat, bertindak, dan berperilaku dengan mengikuti pola yang telah disepakati. Apa yang dilakukan dan dialami adalah mengerjakan, mengamati, melihat, atau mengatakan sesuatu. Pengalaman inilah yang menjadi titik tolak proses selanjutnya.

UNGKAPKAN
 Proses berikutnya yakni masyarakat mengungkapkan dengan cara menyatakan kembali apa yang sudah dialaminya dan tanggapan atau kesan mereka atas pengalaman tersebut, termasuk pengalaman secara menyeluruh masyarakat tersebut.

ANALISA (mengolah)
 Kemudian mengkaji seluruh ungkapan pengalaman, baik pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain, kemudian mengkaitkannya dengan pengalaman lain yang mungkin mengandung ajaran, nilai-nilai, atau makna yang serupa.

KESIMPULAN
 Keharusan untuk mengembangkan atau merumuskan prinsip-prinsip berupa kesimpulan umum dari pengalaman tersebut. Menyatakan apa yang telah dialami dan dipelajari dengan cara seperti ini akan membantu masyarakat untuk merumuskan, merinci, dan memperjelas hal-hal yang telah dipelajari.

TERAPKAN
 Langkah terakhir dalam daur ini adalah melakukan perencanaan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang telah disimpulkan dari pengalaman sebelumnya.

Sesi selanjutnya adalah presentasi dari Yayasan Kembang, sebuah ornop yang pada awalnya melakukan kerja-kerja pelayanan untuk menangani HIV di kalangan penasun. Namun sejak beberapa bulan lalu, melalui dukungan jaringan INSIST di Yogyakarta, melakukan refleksi terhadap kerja-kerja mereka dan mengubah strategi pendekatan. Dalam presentasinya juga dikemukakan bagaimana mereka berbagi tugas dalam proses advokasi di provinsi mereka, bekerja sama dengan komponen masyarakat lain termasuk sejumlah ornop yang bergerak di bidang yang sama.

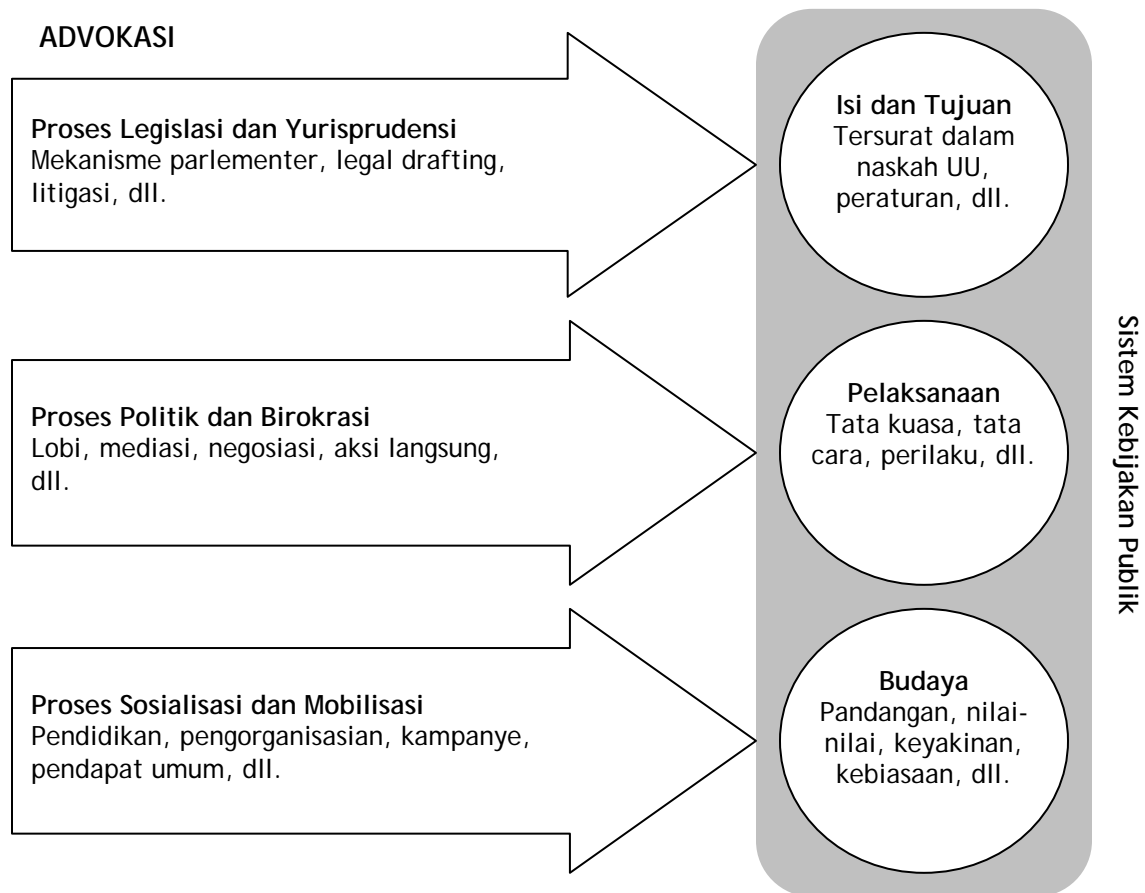
Setelah presentasi Yayasan Kembang, fasilitator menjelaskan tentang proses advokasi dimana terdapat pembagian tiga tugas utama yaitu:

1. Pekerjaan Lapangan. Merupakan "dapur" advokasi bertugas membangun basis massa, melakukan pendidikan politik, serta memobilisasi aksi.
2. Pekerjaan Garis Depan. Bertugas sebagai juru bicara, juru runding, lobi, serta menggalang sekutu.
3. Pekerjaan Pendukung. Menyediakan dukungan dana, logistik, informasi, data, dan akses.

Ketiga pembagian tugas tersebut digerakkan oleh "lingkar inti", yaitu sekumpulan orang dengan ideologi yang sama. Orang-orang yang berada di ketiga pembagian tugas tersebut tidak harus semuanya seideologi dengan orang-orang yang berada di lingkaran inti karena cukup sulit untuk menyamakan ideologi pada banyak orang. Walaupun demikian, ketiga pembagian tugas ini perlu ada dalam melakukan advokasi. Tentunya

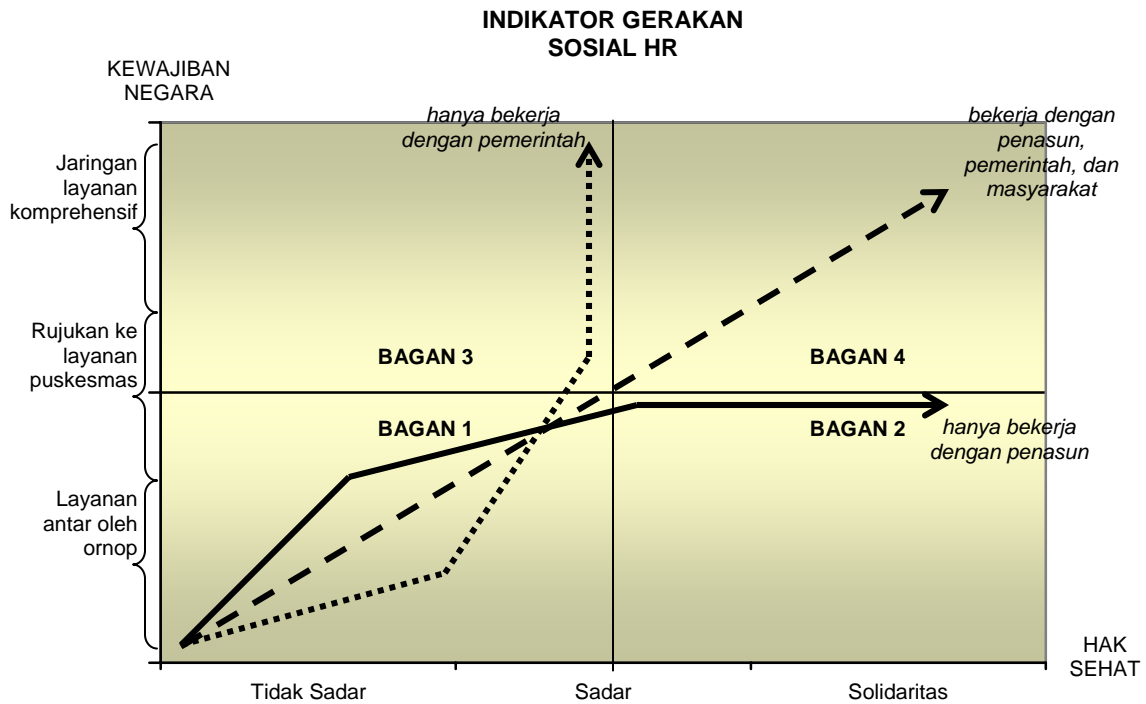
pekerjaan advokasi membutuhkan banyak orang yang terlibat, oleh karena itu tidak mungkin satu ornop dapat melakukan advokasi untuk suatu isu tertentu.

Banyak ornop yang terjebak pada masalah advokasi, dimana ornop tersebut melakukan sendiri advokasi. Sebenarnya yang diadvokasikan itu adalah masalah yang dialami masyarakat, sehingga masyarakatlah yang seharusnya melakukan advokasi. Advokasi selalu berkaitan dengan perubahan kebijakan publik, dimana perubahan tersebut diharapkan dapat mengatasi kerugian yang dialami masyarakat sebagai hasil dari sebuah kebijakan maupun karena tidak adanya kebijakan publik. Ornop tidak merasakan apa yang dialami masyarakat. Di dalam pendidikan rakyat, yang melakukan pendidikan adalah masyarakat itu sendiri karena mereka mengalami hal yang sama dan di antara mereka terdapat kesetaraan. Tak heran jika kemudian banyak produk hukum, hasil "advokasi" ornop, yang tidak diketahui dan tidak membudaya di masyarakat - masyarakat tetap tidak kritis terhadap permasalahan yang menyimpannya.



Dari bagan di atas terlihat bahwa pekerjaan advokasi bukan hanya pekerjaan menemui penguasa di suatu daerah, membujuk untuk kemudian mengubah dan menerapkan sebuah kebijakan publik. Juga pekerjaan advokasi bukanlah sebuah proses untuk membuat sebuah perda, sebab jika untuk satu isu - misal HIV, dibuat perda HIV, maka penyakit lain perlu ada perdanya juga, seperti malaria, TBC, hepatitis, dll. Berapa banyak perda yang harus dibuat? Itu baru satu sektor saja, kesehatan.

Peserta dibagi menjadi tiga kelompok yang tiap kelompoknya diberikan tugas untuk menjawab pertanyaan tentang perubahan apa yang akan dilakukan oleh organisasi peserta. Ketiga kelompok tersebut kemudian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Fasilitator kemudian memaparkan konsistensi dari tujuan, strategi pendekatan, dan kegiatan-kegiatan yang dipresentasikan ketiga kelompok. Untuk lebih memahami arah perubahan, fasilitator mengemukakan sebuah indikator dengan dua dimensi (jumlah penasun yang mengakses layanan dan tingkat kesadaran penasun). Karena selama ini indikator yang digunakan ornop peserta adalah indikator satu dimensi, yaitu jumlah penasun yang diberi layanan.



- Bagan 1: Keadaan dimana kebanyakan layanan diselenggarakan oleh ornop, penasun enggan untuk mendatangi institusi layanan, hanya menunggu layanan antar
- Bagan 2: Penasun mulai sadar akan kesehatannya dan mengambil sendiri layanan yang kebanyakan disediakan oleh ornop
- Bagan 3: Layanan sudah banyak disediakan oleh pemerintah, namun penasun masih enggan untuk mengambilnya
- Bagan 4: Penasun mengambil sendiri layanan di institusi layanan pemerintah yang diselenggarakan secara meluas dengan kualitas layanan yang baik

Di tengah pembahasan indikator, terjadi perdebatan mengenai ornop yang tidak mungkin meninggalkan kerja pelayanan karena jika demikian maka penularan HIV akan terjadi lagi di kalangan penasun. Ditambah lagi masalah peningkatan kesadaran penasun, hingga mencapai solidaritas, dianggap sangat sulit karena berbenturan dengan tindakan-tindakan represif aparat negara dan masyarakat. Oleh karena itu kerja pelayanan adalah yang paling memungkinkan walaupun harus dilakukan di "bawah tanah" sambil terus melakukan pendidikan. Untuk itu fasilitator kemudian menawarkan kepada dua ornop di hari ketiga besok untuk mempresentasikan apa yang telah dilakukan mengenai pendidikan kepada para penasun.

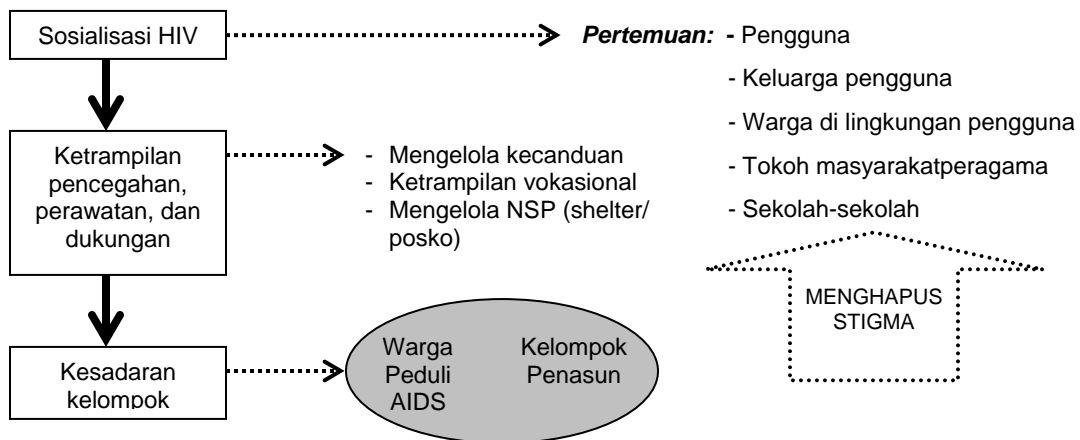
Dalam menutup hari, fasilitator menayangkan cuplikan film yang menceritakan tentang pengorganisasian. Namun untuk tayangan ini, fasilitator tidak ingin menekankan bagaimana keberhasilan pengorganisasian, namun lebih kepada cara pendidikan. Hal ini dicontohkan fasilitator ketika menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbeda kepada peserta seputar film tersebut. Pertanyaan-pertanyaan berbeda akan menghasilkan jawaban-jawaban berbeda pula. Hal ini berkaitan dengan daur belajar yang didiskusikan di awal hari kedua ini: pengalaman bersama menonton film, kemudian peserta mengungkapkan perasaan mereka terhadap pengalaman tersebut melalui pertanyaan yang diajukan, kemudian bersama-sama menganalisa berdasarkan data-data (ungkapan peserta) yang telah ditulis fasilitator, kemudian kesimpulan bersama mengenai apa yang dilihat di film tersebut.

Pengorganisasian masyarakat dimulai dengan pengorganisasian pikiran. Kemudian dari pengorganisasian pikiran ini tercipta suatu pemahaman kritis tentang persoalan yang dihadapi. Setelah terjadi pemahaman bersama, kesepakatan dirumuskan di antara masyarakat tersebut dengan pula membangun mekanisme tindakan dan mekanisme kontrol agar kesepakatan-kesepakatan yang telah dirumuskan dilaksanakan dengan baik. Lalu, sesuai daur belajar, kesepakatan-kesepakatan hasil dari pemahaman kritis terhadap persoalan yang disimpulkan melalui analisa bersama diterapkan hingga mengulangi daur tersebut.

Hari Ketiga

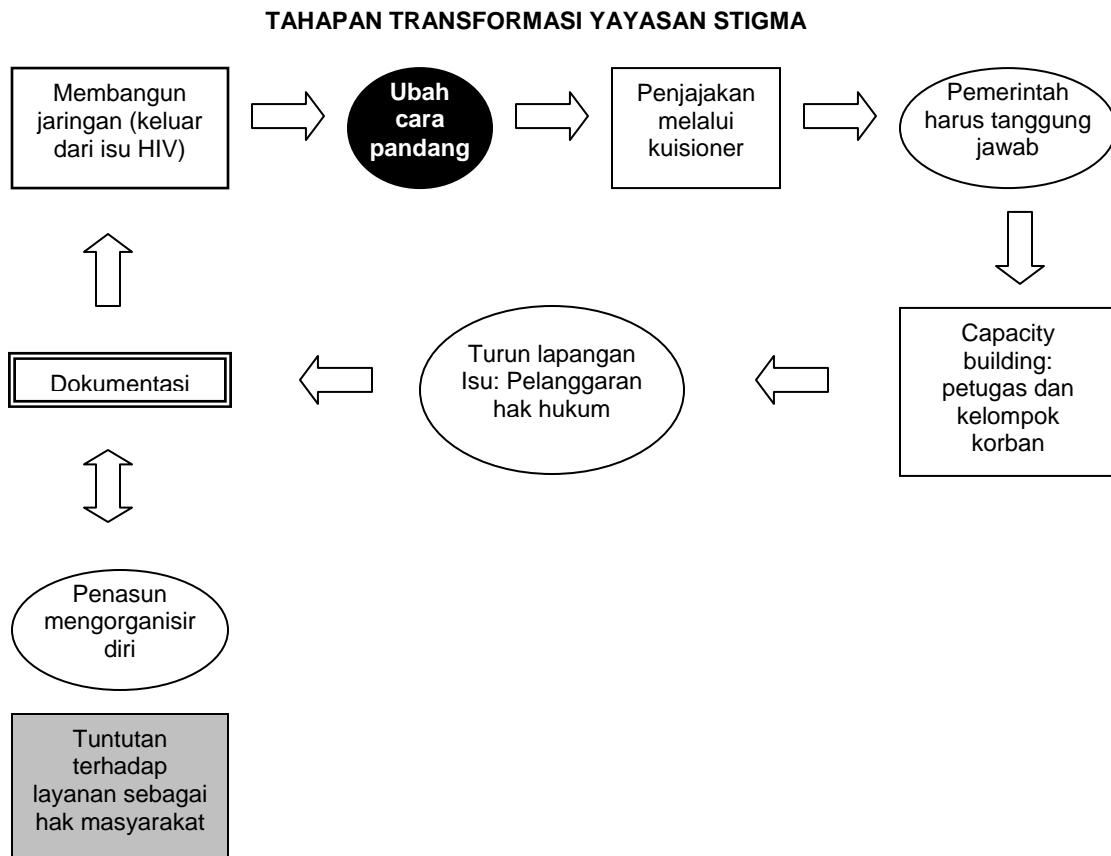
Diawali dengan mengkaji ulang pembelajaran di hari kedua sebelum akhirnya fasilitator mempersilahkan kedua ornop untuk mempresentasikan kegiatan pendidikan yang telah dilakukan. PKBI Jabar mendapat kesempatan pertama, ornop ini mencoba mempresentasikan alur pendidikan yang selama ini dilakukan sebagai berikut:

ALUR PENDIDIKAN PKBI JABAR



Presentasi kedua dari Yayasan Stigma yang bercerita mengenai tahap-tahap transformasi ornop ini, sebelum akhirnya mengenai pendidikan. Sama seperti Yayasan Kembang, ornop ini sejak awal dibentuk melakukan kerja-kerja pelayanan (pemberian jarum suntik dan brosur) kepada penasun untuk menurunkan prevalensi HIV. Diawali dengan "bergaul" atau "ngobrol" dengan organisasi-organisasi di luar isu HIV hingga di

penghujung alur ialah suatu keadaan dimana penasun mengorganisir diri untuk menuntut layanan yang menjadi haknya.



Selanjutnya fasilitator menerangkan mengenai musuh pengorganisasian yaitu individualisme. Ketika telah terjadi pemahaman -> kesepakatan -> aksi yang dialami komunitas, paham individualisme akan menceraikan-beraikan hal-hal yang telah dibangun bersama. Merupakan hal yang diharapkan ketika terdapat persoalan di komunitas, maka komunitas tersebut perlu membangun langkah-langkah bersama. Dengan demikian proses advokasi akan menghasilkan perubahan budaya, sistem, dan isi kebijakan bagi komunitas tersebut.

Dalam proses pengorganisasian, terkait dengan pendidikan masyarakat, fasilitator menekankan hal-hal yang dipresentasikan oleh kedua oronop bahwa baik pendidik dan peserta didik pertama mulai memikirkan, mengamati, dan mensarikan suatu keadaan, terutama keadaan yang memang langsung dialami sendiri. Setelah itu menganalisa secara kritis hingga mencapai suatu pemahaman yang lengkap dan utuh sebelum mengolah pemahaman tersebut hingga menjadi pengetahuan atau kesadaran baru. Pengetahuan atau kesadaran baru ini menjadi dasar dalam merencanakan tindakan bersama. Setelah tindakan bersama dilakukan, perlu diadakan renungan untuk menilai dan mengkaji ulang tindakan tersebut sebagai pelajaran dan pengalaman baru. Hasil dari perenungan ini, berupa pelajaran dan pengalaman baru, menjadi dasar tindakan bersama lanjutan di kemudian hari. Perlu diingat bahwa pendidikan yang menuju pada pemahaman, kesepakatan, dan aksi bersama tidak membawa isu dari luar sebagai

materi atau kurikulum, bahan belajar didapat dari masalah-masalah yang dialami komunitas tersebut. Dengan demikian, tidak masalah mengenai istilah yang digunakan, atau telah biasa digunakan di bidang ini, asalkan arahnya untuk terjadinya pemahaman kritis dan perubahan tatanan di masyarakat.

Berikut adalah langkah-langkah pengorganisasian rakyat:

1. Mulai dari masyarakat sendiri
2. Ajak mereka berpikir kritis
3. Lakukan analisa ke arah pemahaman bersama
4. Capai kesimpulan dan kesepakatan
5. Lakukan tindakan
6. Lakukan evaluasi

Lokakarya dilanjutkan dengan memberikan waktu bagi tiap ornop peserta untuk menulis rekomendasi dari acara ini. Rekomendasi yang disusun lebih bersifat aksi atas lokakarya yang telah dilakukan selama tiga hari ini. Kebanyakan ornop memberikan rekomendasi untuk penguatan kerja advokasi di daerah. Rancangan aksi tersebut didasarkan pada hal-hal berikut:

1. Analisa Masalah
 - a. Pengumpulan data
 - b. Pengolahan data
 - c. Presentasi data
 - d. Argumentasi
2. Rumusan Isu Strategis
 - a. Oponen kecil
 - b. Daya ungkit tinggi
 - c. Dampak luas
 - d. Bermanfaat bagi orang banyak
3. Rumusan Tujuan Strategis
 - a. Sederhana
 - b. Terukur
 - c. Dapat tercapai
 - d. Masuk akal
 - e. Jangka waktu yang jelas
4. Kerangka Strategi
 - a. Konsep
 - b. Pembagian fungsi dan peran
 - c. Mekanisme atau aturan main
 - d. Tahap-tahap
 - e. Proses atau langkah-langkah
 - f. Media

Rekomendasi

PKBI DKI Jakarta & Yayasan Stigma

1. Penjangkauan menjadi pengorganisasian
2. Pendidikan kepada penasun dan masyarakat lainnya termasuk stakeholders
3. Kuantitas (layanan) dan kualitas (perilaku/kesadaran)
4. Perubahan kebijakan akan dibicarakan lebih lanjut

PKBI NTT

1. Aspek layanan: Layanan tersedia oleh pemerintah
2. Proses pendidikan: Perilaku penasun yang bisa mengakses layanan sendiri; pemahaman yang lebih kritis untuk gerakan sosial -> melalui diskusi dan media lainnya; memperjuangkan hak. Pendidikan dilakukan juga di komunitas terdekat penasun, serta menggalang aliansi dengan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada untuk meningkatkan layanan publik.
3. Membangun jaringan

PKBI Jabar, Yayasan Grapiks, & Rumah Cemara

1. Indikator pencapaian harus ditambah (kualitatif), sesuai tahapan-tahapannya
2. Evaluasi isi dan efektivitas "IDUs Meeting" dan "Family Meeting"
3. Materi penjangkauan diganti baik kepada penasun maupun masyarakat
4. Menghubungkan pendidikan masyarakat dengan persoalan penasun sehingga menjadi gerakan bersama
5. Kolaborasi untuk advokasi bersama
6. Meningkatkan kapasitas tenaga lapangan untuk pengorganisasian

PKBI Cirebon

1. Melakukan advokasi bersama untuk layanan terhadap odha dan penasun
2. Mengubah materi penjangkauan
3. Workshop untuk menyusun strategi advokasi

Yayasan Kembang

1. Melanjutkan rencana advokasi yang sudah dirancang
2. Membangun aliansi dengan sejumlah jaringan yang ada
3. Pengolahan data
4. Proyek tidak berjangka satu tahun, lebih

Yayasan Hatihati, Yayasan Matahati, & Yakeba

1. Mendorong penasun untuk mengakses sendiri layanan HR
2. Mendorong pemerintah untuk memperbanyak layanan
3. Mendorong pemerintah untuk membiayai program LSM
4. Merancang strategi advokasi yang tepat untuk Bali
5. Mengubah materi penjangkauan
6. Mengembangkan indikator kemandirian penasun
7. Peningkatan ketrampilan penyedia layanan
8. Pendidikan internal LSM tentang advokasi

Yayasan Metamorfosa

1. Meningkatkan kualitas layanan
2. Meningkatkan proses-proses pendidikan
3. Merancang advokasi sesuai dengan persoalan
4. Membangun aliansi untuk kepentingan rakyat
5. Workshop pengorganisasian dan pendidikan
6. Memproduksi media

Terkait dengan indikator yang diharapkan oleh ornop mitra hibah IHPCP, berikut adalah usulan indikator berdasarkan “indikator gerakan sosial HR” yang dirancang di hari kedua lokakarya ini.

INDIKATOR KUALITATIF

	1	2	3	4
Hak Sehat (kesadaran)	Penasun hanya mau menerima layanan antar ornop	Penasun mengambil layanan di sekretariat ornop	Penasun mengambil layanan di institusi pemerintah	Penasun terlibat dalam peningkatan layanan
Kewajiban Negara (layanan)	A Layanan disediakan oleh ornop	B Layanan ornop di institusi pemerintah	C Layanan oleh institusi pemerintah	D Layanan dilindungi oleh kebijakan daerah

Tabel di atas adalah untuk mengukur: 1) tingkat kesadaran penasun hasil dari pendidikan; 2) tingkat layanan yang disediakan oleh pemerintah sebagai kewajiban negara hasil dari proses advokasi. Ukuran ideal ketika menggunakan tabel ini adalah 4D, yaitu situasi dimana layanan-layanan kesehatan bagi penasun memiliki dasar hukum sehingga pelaksanaannya dianggarkan oleh pemerintah, penasun beserta masyarakat terlibat aktif dalam upaya-upaya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan. Sebagai contoh, ukuran keadaan bisa saja 2C, yaitu keadaan dimana layanan-layanan mulai disediakan oleh pemerintah, namun para penasun masih enggan mengambil ke sana melainkan tetap di sekretariat ornop. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh petugas-petugas kesehatan yang masih diskriminatif, ketidakberterimaan masyarakat terhadap penasun, maupun tempat layanan yang masih sangat jarang.

INDIKATOR KUANTITATIF

1. Jumlah penasun yang menerima layanan ornop (LSM):
 - a. Jumlah penasun yang menerima jarum suntik per bulan dan kumulatif
 - b. Jumlah jarum suntik terdistribusi per bulan dan kumulatif
 - c. Jumlah penasun yang ditemui per bulan
2. Jumlah penasun yang mengambil layanan di institusi pemerintah:
 - a. VCT per bulan dan kumulatif
 - b. NSP per bulan dan kumulatif
 - c. MMT per bulan dan kumulatif
 - d. ARV per bulan dan kumulatif
 - e. Periksa kesehatan lain per bulan dan kumulatif
3. Jumlah institusi pemerintah yang menyediakan layanan bagi penasun:
 - a. VCT kumulatif
 - b. NSP kumulatif
 - c. MMT kumulatif
 - d. ARV kumulatif
 - e. Pemeriksaan kesehatan lain kumulatif

Lokakarya Nasional Peran LSM dalam Meningkatkan Layanan Publik: Belajar dari Gerakan Sosial lain untuk Meningkatkan Respon terhadap HIV dan AIDS

Kerangka Acuan

Inisiatif pengurangan dampak buruk napza di Indonesia hingga pertengahan 2005 masih belum dipandang sebagai respon kesehatan masyarakat, namun lebih merupakan respon sekumpulan orang yang peduli terhadap masalah ini, kadang disebut LSM. Sayangnya, hal ini justru mereduksi partisipasi aktif dari elemen negara dan masyarakat dalam upaya-upaya pengurangan dampak buruk napza. Mempertimbangkan pengguna napza ilegal berada di "bawah tanah", diyakini bahwa mereka akan menemukan kesulitan untuk berhubungan dengan sistem atau layanan kesehatan masyarakat yang berada di ruang-ruang publik terbuka. Ketika itu hanya terdapat satu puskesmas yang memberikan layanan pengurangan dampak buruk di antara 41 LSM di seluruh negeri.

Kemudian sejak saat itu kesadaran mulai tumbuh di kalangan aktivis pengurangan dampak buruk bahwa negara harus menyediakan layanan untuk dapat melindungi kesehatan masyarakat. Di pihak lain, untuk memobilisasi partisipasi masyarakat, beberapa LSM membentuk kelompok-kelompok orang dengan HIV, pengguna napza ilegal, dan warga peduli. Bagaimanapun, hal ini terjadi secara sporadis atas perkenalan aktivis pengurangan dampak buruk napza dengan aktivis gerakan sosial lain, khususnya hak asasi manusia.

Lembaga swadaya masyarakat berpotensi untuk memperkuat masyarakat sebagaimana dengan layanan publik untuk pengurangan dampak buruk napza karena memiliki pengalaman dalam memberikan layanan kepada pengguna napza. Di kebanyakan kasus, untuk isu ini, LSM memusatkan diri pada penyediaan layanan dan memberikan informasi praktis kepada masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pengurangan dampak buruk sebagai respon kesehatan masyarakat, serta untuk memperkuat pemerintah dalam penyediaan layanan. Program-program berbasis masyarakat perlu dibangun dan aktivisme petugas LSM perlu ditingkatkan. Dan untuk menginisiasi upaya ini, IHPCP dan KPA Nasional bersama mitra-mitra kerja di tingkat nasional maupun provinsi akan mengadakan serangkaian kegiatan bertujuan untuk membangun aktivisme dan rencana kegiatan pelibatan masyarakat.

Tujuan Umum

1. Mempertemukan gerakan sosial dengan pengurangan dampak buruk napza di Indonesia;
2. Menumbuhkembangkan aktivisme di kalangan LSM dan mendukung perluasan skala gerakannya;
3. Mengembangkan ketrampilan bekerja dengan pemerintah sebagaimana dengan masyarakat;
4. Memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat dalam membangun strategi dan aksi lokal;
5. Meningkatkan hubungan antara aktivis pengurangan dampak buruk dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi secara inklusif dalam gerakan-gerakan sosial.

Bentuk Kegiatan

Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan umum tersebut, IHPCP bersama KPA Nasional merancang sebuah rangkaian kegiatan yang melibatkan LSM maupun kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini aktif dalam upaya pengurangan dampak buruk napza di Indonesia. Kegiatan pertama dari seluruh rangkaian tersebut adalah lokakarya nasional berjudul "Peran LSM dalam Meningkatkan Layanan Publik: Belajar dari Gerakan Sosial lain untuk Meningkatkan Respon terhadap HIV dan AIDS". Lokakarya ini bertujuan memperluas perspektif program pengurangan dampak buruk napza sebagai gerakan sosial di Indonesia.

Kegiatan ini akan diadakan selama tiga hari khusus bagi LSM-LSM mitra IHPCP sebagai ajang konsolidasi rencana-rencana aksi ke depan serta merefleksikan kegiatan yang selama ini telah dilakukan di lima provinsi. Lokakarya ini turut membahas pengalaman gerakan lain dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terkait dengan layanan publik sebagai hak warga negara.

Hasil yang Diharapkan

- Sebuah perspektif yang lebih luas tentang gerakan sosial sebagai alat peningkatan layanan publik terhadap HIV dan masalah masyarakat lainnya;
- Sebuah hubungan yang baik, inklusif, dan saling menghargai antar LSM sebagai perluasan skala gerakan pengurangan dampak buruk napza;
- Sebuah pemahaman yang mendalam mengenai peran LSM, pemerintah, dan masyarakat dalam layanan-layanan publik;
- Sebuah alat ukur yang spesifik dari capaian-capaian LSM, khususnya ketika menuangkan konsep program ke dalam proposal.

Agar lokakarya dapat berjalan efektif, setiap LSM diminta untuk membawa materi presentasi tentang:

- a. Evaluasi kegiatan HR selama setahun terakhir;
- b. Rencana program HR untuk setahun ke depan.

Peserta

Jakarta: PKBI DKI Jakarta, Yayasan Stigma, IHPCP DKI Jakarta

Yogyakarta: Yayasan Kembang

Jabar: Yayasan Grapiks, PKBI Cirebon, Rumah Cemara, PKBI Jabar, IHPCP Jabar

Bali: Yayasan Matahati, Yayasan Hatihati, Yakeba, IHPCP Bali

NTT: PKBI NTT, IHPCP NTT

Sulsel: Yayasan Metamorfosa, IHPCP Sulsel

Catatan: Tiap LSM dihadiri oleh direktur dan manajer program (2 orang)

Tiap IHPCP provinsi dihadiri oleh PTO atau PC (1 orang)

Waktu dan Tempat

Tempat: Hotel Milenum, Ruang VIP Hwa-Ting III-V
JI Fahrudin No 3 Jakarta Pusat

Waktu: 28-30 Mei 2007

Fasilitator

Lokakarya ini akan difasilitasi oleh seorang fasilitator berpengalaman dalam pendidikan kritis rakyat.

Agenda

Waktu	Kegiatan	Keterangan
Pra Kegiatan, 27 Mei 2007		
12.00-00.00	Peserta check in	
Malam I	*	
Hari I, 28 Mei 2007		
08.30-09.15	Pembukaan: Kontrak kegiatan	IHPCP dan fasilitator
09.15-10.30	Aktivisme dalam Pengurangan Dampak Buruk Napza	James Blogg
11.00-12.00	<i>Confidentiality and Disclosure Rights</i> : Mengikis Eksklusivitas Program-program HIV	Abby Ruddick
13.00-15.00	Presentasi Program HR 3 LSM: Evaluasi dan Strategi ke Depan	Fasilitator
15.30-17.30	Paparan respon dan situasi	Fasilitator
Malam II	*	
Hari II, 29 Mei 2007		
08.30-10.00	Analisa respon dan situasi	Fasilitator
10.30-12.00	(lanjutan) Analisa Respon dan Situasi	Fasilitator
13.00-15.00	Analisa peran	Fasilitator
15.30-17.30	(lanjutan) Analisa Peran	Fasilitator
Malam III	*	
Hari III, 30 Mei 2007		
08.30-10.00	Isu Gerakan Sosial	Fasilitator
10.30-12.00	Indikator Community Development untuk LSM HR tingkat Kabupaten/Kota	Arry Lesmana
13.00-15.00	Perumusan Rencana Aksi dan Strategi	Fasilitator
15.30-17.00	(lanjutan) Perumusan Rencana Aksi	Fasilitator
Peserta check out sejak makan siang		

* waktu dapat digunakan untuk konsolidasi dengan IHPCP provinsi